

**EVALUASI PROGRAM DANA DESA TERHADAP KUALITAS
HIDUP DAN EKONOMI MASYARAKAT DI PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh :

NAMA : UCI PRANITA
NPM : 1605180019
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVESITAS MUHAMMDIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : UCI PRANITA

N.P.M : 1605180019

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM DANA DESA TERHADAP
KUALITAS HIDUP DAN EKONOMI MASYARAKAT DI
PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : UCI PRANITA
NPM : 1605180019
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM DANA DESA TERHADAP KUALITAS HIDUP DAN EKONOMI MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I



(Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si)

Penguji II



(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Pembimbing



(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



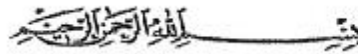
(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : UCI PRANITA

NPM : 1605180019

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Evaluasi Program Dana Desa Terhadap Kualitas Hidup dan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



UCI PRANITA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Uci Pranita
NPM : 1605180019
Dosen Pembimbing : Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan D
Judul Penelitian : Evaluasi Program Dana Des
Terhadap Kualitas Hidup Dan Ekonomi
Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Penambahan Data IPD	10/07 2020	
Bab 2	Menambahkan Teori Pendapatan Nasional	11/07 2020	
Bab 3	Pengubahan Model Estimasi	22/07 2020	
Bab 4	Geografi Kabupaten Sumatera Utara	29/08 2020	
Bab 5			
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC. Sidang Meja Hijau.		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si)

ABSTRAK

Dalam Skripsi ini, penulis mengangkat judul “Evaluasi Program Dana Desa Terhadap Kualitas Hidup Dan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara” topik ini diangkat berdasarkan Fenomena yang terjadi dalam laporan tahunan Badan Pusat Statistik bahwasanya Kualitas Hidup Masyarakat belum sampai kepada daerah-daerah tertinggal di Indonesia sehingga masih banyak ketimpangan yang terjadi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tujuan utama penelitian ini ialah Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang Indeks Pembangunan manusia dan Melakukan estimasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa pasca kebijakan dana desa untuk Kabupaten se-Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, dimana data yang dihimpun adalah data *cross section* adalah seluruh kabupaten se-Provinsi Sumatera Utara sedangkan data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini ialah dihimpun sebanyak 2 tahun, yaitu tahun 2014 dan 2018. Berdasarkan hasil estimasi dengan metode regresi berganda menggunakan *software* E-Views 8. Hasil estimasi pertama yaitu pengaruh IPM, PDRB, Dana Desa, Jumlah Penduduk sebesar 76%, sedangkan sisanya 20,4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model estimasi atau berada dalam *disturbance error term*, Hasil metode estimasi kedua yaitu variabel bebas Dana Desa, Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, sama-sama berpengaruh pada Indeks Pembangunan Desa. Secara parsial, variabel IPM berpengaruh kuat dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD) dengan P value dari t parsial IPM adalah 0,00002 dengan taraf signifikan 1% dibanding variabel lain. Dalam model regresi pada data panel dilakukan uji signifikan antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect* menghasilkan nilai p Value dari 0.8779 dimana lebih cenderung ke variabel series yang bermakna metode yang baik digunakan adalah *Fixed Effect* dibanding *Random Effect*.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Desa, Dana Desa, Jumlah Penduduk PDRB, IPM.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Program Dana Desa Terhadap Kualitas Hidup Dan Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara”** yang diajukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewah Kepada Kedua Orang Tua tercinta Agustina Br Sembiring dan Edi Suranta Sinulingga, serta kedua adik saya yang telah mendoakan dan member semangat, membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi Ini.
2. Keluarga terdekat saya yang telah member dukungan dan semangatnya kepada saya selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, S.E, M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan arahan, dan masukkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Lailan Safina selaku dosen saya yang telah banyak membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
9. Bapak/ibu dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staf Biro Ekonomi Pembangunan yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan.
11. Sahabat-sahabat saya Irmaya Sari, Bela Safira, Nina Wulandari Ginting, Nela Widya Siregar, dan juga AdelliaWardani, teman seperjuangan mulai dari awal perkuliahan hingga saat ini, dan semoga seterusnya, yang telah membantu saya dalam banyak hal. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu .Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh

Medan, 26 November 2020

Penulis,

UciPranita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BABI PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Identifikasi Masalah	21
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah	21
1.3.1 Batasan Masalah.....	21
1.3.2 Rumusan Masalah	22
1.4 Tujuan Penelitian.....	22
1.5 Manfaat Penelitian.....	22
1.5.1 Manfaat Akademik	22
1.5.2 Manfaat Non Akademik	23
BABII LANDASAN TEORI	24
2.1 Landasan Teori.....	24
2.1.1 Teori Pendapatan Nasional	24
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	25
2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi.....	26
2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi	33
2.2 Kebijakan/Regulasi	35
2.2.1 Kebijakan Desentralisasi Fiskal.....	35
2.2.2 Otonomi Desa UUD No 6.....	36
2.2.3 Peraturan Menteri Keuangan	38
2.2.4 Peraturan Tentang Dana Desa.....	39
2.2.5 Program Dana Desa	41
2.3 Penelitian Terdahulu	42
2.4 Kerangka Konseptual	44

2.5 Hipotesa	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Definisi Operasional	47
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	48
3.3.1. Waktu penelitian	48
3.3.2. Tempat Penelitian.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Model Estimasi	49
3.7 Metode Estimasi.....	50
3.8 Prosedur Analisis	51
3.8.1 Analisis Deskriptif	51
3.8.2 Analisis Pengujian Regresi	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Gambaran Umum Sumatera Utara.....	59
4.1.1 Letak Geografis Sumatera Utara	59
4.1.2 Kondisi Topografi	62
4.1.3 Kondisi Demografi	63
4.1.4 Kondisi Ekonomi	65
4.1.5 Perkembangan IPM Sumatera Utara.....	69
4.1.6 Gini Ratio	71
4.1.7 Standart Hidup Layak	72
4.2 Analisis Deskriptif	73
4.3 Estimasi Analisis Regresi.....	74
4.3.1 Penaksiran	74
4.3.2 Uji Statistik	74
4.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	75

4.3.4 Uji Hausman	75
4.4 Interpretasi Hasil	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara menurut Komponen	12
Tabel 1.2 IPD Menurut Dimensi ,Status IPD, dan Jumlah Desa Berdasarkan Pulau di Indonesia tahun 2018	14
Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	47
Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kab. di Provinsi Sumatera Utara.....	61
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin Kab. Provinsi Sumatera Utara.....	63
Tabel 4.3 PDRB menurut Lapangan Usaha Prov Sumatera Utara Tahun 2019	66
Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Kabupaten Tahun 2016-2019	68
Tabel 4.5 IPM Sumatera Utara menurut Kab/Kota Tahun 2017-2018.	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status IPD Provinsi 7
Gambar 1.2	Perkembangan Pembangunan Desa di Indonesia Menurut Status IPD 9
Gambar 1.3	Struktur Perekonomian Provinsi Sumatera Utara..... 17
Gambar 2.1	Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 26
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual 44
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Provinsi Sumatera Utara..... 60
Gambar 4.2	Grafik Jumlah Penduduk Sumatera Utara 65
Gambar 4.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Tahun 2010-2018..... 69
Gambar 4.4	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Sumatera Utara..... 71
Gambar 4.5	Pengeluaran per Kapita per Tahun Sumatera Utara 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Salah satu tujuannya adalah pengentasan kemiskinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Tujuan penggunaan dana desa di dalamnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa, dalam perkembangannya. Sehingga mencapai menjadi desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. (Sriyati ,dkk 2019).

Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta

memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamanatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Sriniyati ,dkk 2019).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara. Pembangunan ekonomi selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi begitu juga sebaliknya.

Pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi pada era Jokowi banyak merealisasikan kebijakan pembangunan dengan melakukan pembangunan infrastruktur diluar Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia. Ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas ekonomi baik orang maupun barang dengan biaya yang lebih murah dan waktu yang lebih cepat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat indonesia, mendorong pergerakan ekonomi daerah, mengurangi biaya logistik dan memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Pada lima tahun terakhir atau periode pertama (2014-2019) era pemerintahan JKW-JK , berbagai infrastruktur yang dibangun kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) turut berkontribusi pada berbagai capaian pemerintah. Diantaranya peningkatan daya saing global Indonesia serta mengukur kesenjangan ekonomi.

Salah satu upaya mendorong pergerakan ekonomi daerah, pemerintah meningkatkan belanja anggaran untuk pembangunan infrastruktur di desa melalui program padat karya tunai. Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar program pemanfaatan dana desa ditambah dengan program kementerian yang dikucurkan ke daerah atau desa sehingga bias menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang sebanyak banyaknya.(CNBC Indonesia,2019)

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks pembangunan daerah baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi. Pembangunan desa ditunjukkan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera ,dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawali implementasi UU no.6 Tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten , dan berkelanjutan dengan supervise, dan pendampingan (Adisasmita,2006).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.(Kemenkue,2016)

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan DD dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.(Thomas,2013)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU no 6 tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

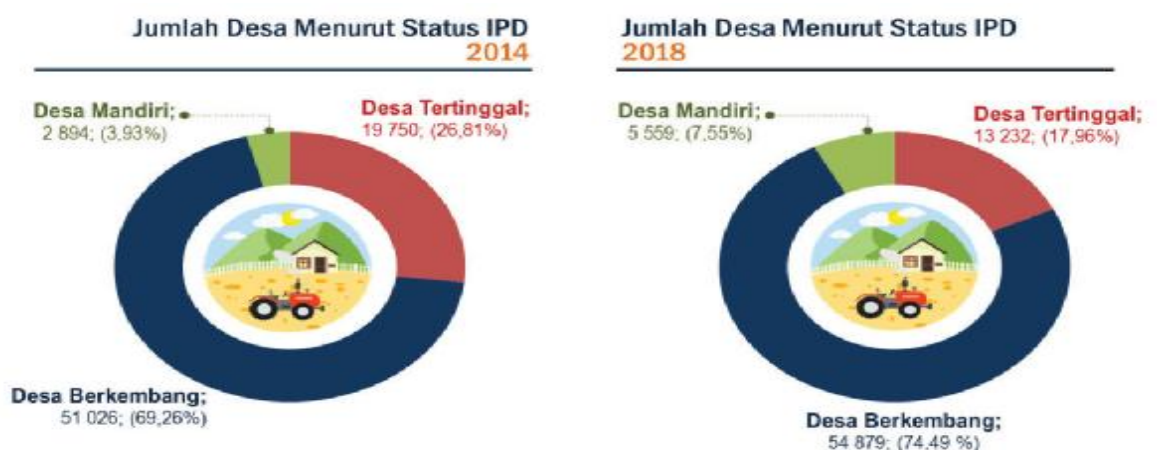
1. Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa definisi dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan yaitu (1) Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan; (2) Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan. (3)Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan. (4) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjukkan untuk penalaran pelaksanaan program pengendalian. (5) Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan. (6) Intensitas kegiatan petugas dan pengendalian masalah. (7) Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. (8) Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit. (9) Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan. (10) Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat.

2. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya. Pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, gedung, pelabuhan, dan lain sebagainya jelas sekali berpijak pada ruang yang ada di permukaan bumi. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Contoh kongkrit dari pembangunan fisik di pedesaan seperti pembangunan jembatan yang menghubungkan suatu desa ke desa lain yang dilintasi oleh sungai.

Gambar 1.1. Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status Indeks Pembangunan Desa provinsi , 2014 dan 2018



Sumber: BPS Indeks Pembangunan Desa Provinsi ,2014

Untuk memenuhi target pembangunan desa, pemerintah memetakan pembangunan desa berdasarkan tingkat pembangunannya menurut Indeks

Pembangunan Desa (IPD) ke dalam 4 klasifikasi. Hasilnya, berdasarkan. Publikasi IPD tahun 2014, desa mandiri berjumlah 2.898 desa; desa berkembang berjumlah 50.763 desa; dan desa tertinggal berjumlah 20.432 desa. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa desa-desa yang telah teregistrasi, terpetakan menurut kondisi pembangunan desa. Namun, untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa dari tahun 2014 dan 2018, dilakukan penyamaan desa antara 2014 dan 2018. Hal ini bertujuan, supaya pembangunan yang wilayah yang dilaksanakan antara tahun 2014 dan 2018 merujuk pada suatu wilayah yang sama. Dengan demikian, perlu direduksi dengan menyatukan kembali desa yang mengalami pemekaran dan menyesuaikan kembali desa yang mengalami penggabungan sejak 2014 hingga 2018. Sehingga wilayah desa yang dapat dilihat perkembangannya secara panel 2014 dan 2018 sebesar 73.670 desa. Perkembangan pembangunan desa yang secara panel ini dilakukan untuk mengetahui realitas pembangunan desa yang sesungguhnya, dan memperkirakan seberapa besar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa. Hasilnya menunjukkan bahwa desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa dan desa mandiri bertambah sebanyak 2.665 desa, dapat dilihat pada grafik diatas.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan perekonomian untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari manajemen pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun

provinsi, karena pembangunan desa harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten.

Pembangunan pedesaan sebagai sasaran pembangunan, ditunjukkan untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan perekonomian di Desa. Pemberian Dana Deesa merupakan wujud dari pemenuhan Hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan wilayah yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (PermenDes,2015)

Perkembangan pembangunan desa ini dilihat dari enam dimensi standard minimal pelayanan dasar. Masing-masing memiliki capaian yang berbeda. Capaian tertinggi terjadi pada dimensi penyelenggaraan pemerintahan, yang meningkat sebesar 9,81 poin. Sementara capaian peningkatan terendah pada dimensi pelayanan dasar sebesar 0,92 poin. Perkembangan masing-masing dimensi dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1.2. Perkembangan Pembangunan Desa Di Indonesia Menurut Status Indeks Pembangunan Desa



Sumber : BPS Indeks Pembangunan Desa, 2018

Dilihat dari data diatas menunjukkan Pelayanan Dasar terjadi peningkatan sebesar 0,92. Infrastruktur juga mengalami peningkatan sebesar 5,42, Transportasi meningkat sebesar 3,50. Pelayanan umum meningkat 1,88 dan penyelenggaraan pemerintah desa meningkat 9,81 serta Indeks Pembangunan Desa meningkat 3,65. Dari dimensi-dimensi diatas penyelenggaraan pemerintah maju lebih pesat dibanding yang lain disusul oleh infrastruktur dan yang paling rendah adalah pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2018 terjadi perkembangan dari tiap tiap dimensi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ukuran tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa didukung oleh adanya pengelolaan badan usaha milik desa atau Bumdes. Pembentukan Bumdes di masukan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/ budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang di serahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Pemberian Dana desa diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam mengembangkan desa dan meningkatkan kesejahteraan.(Kemenkes)

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi ekonomi 1998 dengan tujuan dapat mencapai pemerataan pembangunan ekonomi diseluruh daerah, kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonominya. Tujuan utamanya untuk melakukan estimasi dan membuktikan bagaimana variable transfer daerah seperti DID, DAU, DAK, dan DD dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan ekonomi. Selanjutnya IPM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi model 2SLS.

Selanjutnya variabel DID dan DAU tidak signifikan, sedangkan DAK, DD dan IPM berpengaruh positif dan signifikan walaupun relative kecil terhadap tingkat IPM pada provinsi-provinsi di Indonesia. Artinya kebijakan untuk peningkatan dana transfer ke daerah di level provinsi, hanya DAK dan DD mempengaruhi peningkatan IPM.

APBD ternyata banyak membiayai komponen rutinitas sehingga sangat mengandalkan kucuran dana APBN. Konsep otonomi daerah di Indonesia bukan untuk provinsi melainkan untuk kabupaten dan kota. Sedangkan variabel IPM dengan model 2SLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (Prawidya Hariani RS, 2018)

Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2019 sebesar 71,92 lebih tinggi dari IPM tahun 2018 yang sebesar 71,39. Kenaikan IPM ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan dan serta daya beli masyarakat. Peningkatan ini merupakan bukti kerja nyata pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2018 juga terlihat dari perubahan status

pembangunan manusia di tingkat provinsi, secara umum ada 8 provinsi yang mengalami peningkatan status pembangunan manusia. provinsi DKI Jakarta yang berstatus “sedang” pada 2017 berubah status menjadi “ tinggi”. Sementara itu provinsi Papua mengalami peningkatan status dari rendah ke “sedang” .berikut perkembangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2013 hingga tahun 2018. (CNBC Indonesia 2019)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara

IPM Sumatera Utara tahun 2018 mencapai 71,18 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 70,57. Meski demikian, capaian tersebut masih sedikit berada di bawah angka nasional 71,39. Peningkatan IPM tersebut didorong oleh peningkatan pada 3 aspek esensial, yaitu aspek umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga aspek tersebut dijabarkan ke dalam 3 indeks yaitu Indeks Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta Indeks Pengeluaran Per Kapita, yang keseluruhannya menunjukkan peningkatan ditahun 2018.

Tabel 1.1 IPM Sumatera Utara Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	8	9	10	11
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	67.94	68.04	68.29	68.33	68.37	68.61
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.41	12.61	12.82	13.00	13.1	13.1
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.79	8.93	9.03	9.12	9.25	9.3
Pengeluaran per Kapita	Rp 000	9,309	9,391	9,563	9,744	10,036	10,391
IPM		68.38	68.87	69.51	70	70.57	71.18
Pertumbuhan IPM	%	0.94	0.72	0.93	0.7	0.81	0.9

Sumber :BPS Indeks Pembangunan Manusia SUMUT,2018

Berikut nilai dari setiap komponen dari tahun ke tahun dan perubahan serta perkembangan yang terjadi dari setiap komponen salah satu nya Umur Harapan

Hidup Saat Lahir (UHH) pada tahun 2013 sebesar 67,94 terjadi peningkatan terus menerus dan pada tahun 2018 menjadi 68,61 merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Komponen selanjutnya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) selama periode 2013-2018, harapan lama sekolah di provinsi Sumatera utara mencapai 13,1 yang berarti anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau Sarjana. Untuk komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh 9,3 pada tahun 2018 pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia yang lebih baik. Secara rata-rata penduduk usia 15 tahun keatas pendidikannya telah mencapai SMP dan terakhir adalah komponen Pengeluaran per Kapita standart hidup layak menjadi salah satu dimensi yang dilihat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di dsamping pengetahuan serta umur panjang dan hidup sehat. Standart hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2013 perkapita disesuaikan masyarakat sebesar Rp 9.30 juta per tahun. Angka tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 10,39 juta pengeluaran per kapita masyarakat meningkat setiap tahun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau *purchasing power parity* merupakan suatu perkembangan yang semakin membaik untuk pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan aspek pemerataan (*equity*) dalam distribusi pendapatan juga perlu diupayakan melalui pembangunan modal manusia. Salah satu upaya dalam menekan tingkat ketimpangan adalah mengupayakan agar penduduk mendapatkan kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar untuk mengembangkan potensinya yang kemudian akan tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan maka untuk melakukan pemerataan tersebut harus melalui daerah terpencil seperti desa diantaranya dengan program pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa.

Dana Desa (DD) fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dan akan di ukur melalui Indeks Pembangunan Desa di setiap daerah untuk melihat perkembangan dari setiap desa yang terdapat diwilayah masing- masing.

Tabel 1.2 IPD Menurut Dimensi, Status IPD, dan Jumlah Desa Berdasarkan Pulau di Indonesia 2018

Nama Pulau	IPD 2018	Dimensi IPD					Persentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah Desa
		Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sumatera	60,02	59,09	46,15	77,72	54,01	67,85	4,11	25,23	1,48	23 241
Jawa-Bali	67,82	68,31	54,78	81,15	59,14	80,34	0,26	25,28	5,09	23 108
Nusa Tenggara	56,25	53,86	34,41	82,55	45,78	75,25	1,46	3,77	0,13	4 043
Kalimantan	56,66	55,41	40,90	71,01	55,35	71,36	2,24	6,26	0,28	6 624
Sulawesi	60,63	57,81	44,77	83,04	51,81	72,78	1,46	9,83	0,38	8 804
Maluku	52,00	49,08	34,68	73,39	46,30	66,55	1,28	1,66	0,07	2 268
Papua	35,57	26,15	19,76	57,86	42,02	52,24	8,36	1,37	0,02	7 348
Indonesia	59,36	57,65	44,63	77,00	53,60	71,40	19,17	73,40	7,43	75 436

Sumber :BPS Indeks Pembangunan Desa Provinsi,2018

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Utara sebesar 56,62. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 59,36. Dari 5.437 desa, terdapat 3.768 desa dalam kategori berkembang (69,30 persen), sebanyak 200 desa mandiri (3,68 persen), dan sisanya sebanyak 1.469 desa (27,02 persen) dalam kategori desa tertinggal. Berdasarkan nilai Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada Dimensi Kondisi Infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 41,71. Untuk Dimensi Pelayanan Dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,94, Dimensi Pelayanan Umum sebesar 49,76, dan Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 62,43. Saat ini, desa-desa di Pulau Sumatera didominasi oleh desa-desa berkembang yaitu sekitar 81,88 persen dari total 23.241 unit desa. Sementara persentase desa mandiri sebanyak 4,79 persen (1.114 desa) dan desa tertinggal 13,33 persen (3.097 desa). Dilihat dari dimensinya, aksesibilitas/transportasi memiliki nilai indeks yang paling besar yaitu 77,72, sedangkan dimensi kondisi infrastruktur memiliki nilai indeks paling kecil yaitu hanya 46,15.

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Sumber-sumber pendapatan Desa yaitu; (1) pendapatan asli desa (2) Dana desa yang bersumber dari APBN (3) bagian dari hasil PDRD Kab/kota (4) alokasi Dana desa dari Kab/Kota (5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan

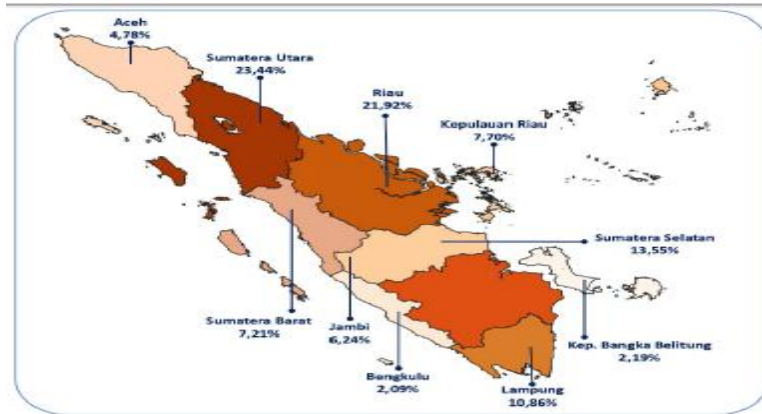
APBD Kab/Kota (6) hibah dan sumbangan pihak ketiga dan (7) lain-lain pendapatan desa yang sah. Tujuan diberikannya Dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.(Permendagri, 2014)

Perekonomian Provinsi Sumatera Utara

Potensi ekonomi desa sangat penting pada pertumbuhan ekonomi desa yang merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, caranya melalui program yang ditunjukkan ke desa-desa dengan tujuan pemerataan pembangunan dan ekonomi.

Semenjak diterbitkan Undang-undang Desa Nomor 6 pemerintah daerah mulai mendorong pemerintahan desa untuk dapat mengelola dana anggaran untuk desa secara mandiri. Melingkupi beberapa aspek dan program ekonomi unggulan, sehingga dapat menjadi pusat perputaran ekonomi yang produktif dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Hal ini erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur perekonomian di Pulau Sumatera secara spasial pada triwulan III-2019 masih didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kontribusi sebesar 23,44 persen; kemudian diikuti oleh Provinsi Riau sebesar 21,92 persen dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,55 persen.

Gambar 1.3 Struktur Perekonomian Provinsi Sumatera Tahun 2019



Sumber :BPS Perekonomian SUMUT,2019

Lembaga Administrasi Negara RI (2017), mengidentifikasi tantangan dan

permasalahan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Indonesia, antara lain: a) Sumber daya manusia masih belum memahami fungsi, tujuan serta manfaat anggaran yang diberikan pemerintah; b) Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa tidak tepat sasaran sesuai aturan pemerintah dan daerah; c) Proporsi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa masih dialokasikan pada kegiatan fisik bukan non-fisik; d) Regulasi yang kontradiktif antara Pemerintah pusat (Kemendagri, Kemendes-PDPT) dengan Pemerintah Daerah (Perbup); e) Belum adanya road-map terkait kebijakan Dana Desa untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan untuk mengelola dan menggunakan dana Desa, memiliki kewenangan yang saling berbeda. Kewenangan Pemerintah Desa diantaranya:

1. Menerima pengalokasian Dana Desa
2. Diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Mengajukan RKPDes dan APBDes
4. Mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa

5. Menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota

Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Membuat dan menetapkan kebijakan taktis operasional berupa Peraturan Bupati/Walikota tentang Tatacara Pembagian dan penetapan rincian besaran Dana Desa pada setiap Desa.
2. Menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD
3. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan cq. Mendagri, Mendes-PDPT, dan Gubernur.
4. Memberikan persetujuan jika Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak diprioritaskan.

Kebijakan Dana Desa dapat menjadi pendorong untuk mendukung pencapaian program pembangunan ekonomi daerah. Namun sasaran pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Desa sering bermasalah. Bagi masyarakat, dampak perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan pada umumnya adalah “untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat”. Karenanya, perubahan yang diharapkan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa seperti:

1. Tercapainya kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya BUMDes. Mewujudkan harapan tersebut harus diikuti dengan meningkatnya konsolidasi internal di Desa antara masyarakat – Kepala Desa – dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Artinya bahwa dalam mengelola dan menggunakan dana Desa bukan hanya otoritas dari Kepala Desa

(walaupun sebagai penguasa di Desa), namun harus melibatkan unsur-unsur masyarakat dan BPD, mulai dari menyusun hingga mengawasi program.

2. Meningkatnya infrastruktur Desa dan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk atas tiga dimensi dasar, yaitu; umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standard hidup layak. Artinya bahwa pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari dana Desa untuk kepentingan masyarakat bukan hanya pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non-fisik yaitu peningkatan kualitas manusia.
3. Mendorong pertumbuhan pembangunan daerah dan sinkronnya pembangunan Desa berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah. Jumlah Dana Desa yang diterima dalam jumlah besar sebenarnya dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, mengingat Daerah juga memiliki keterbatasan sumberdaya keuangan. Sehingga Dana Desa diharapkan dapat menjadi sugesti mendorong pertumbuhan pembangunan daerah dan pemanfaatan Dana Desa akan sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Selanjutnya Dampak ekonomi dari kebijakan Dana Desa bagi masyarakat dan pembangunan, diantaranya:

1. Sarana-prasarana Desa seperti jalan desa, penyulingan air dan irigasi “lebih mumpuni” sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani.
2. Semakin giatnya kegiatan ekonomi masyarakat Desa, ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), sedangkan disisi lain memudarnya semangat gotong royong tetapi partisipasi masyarakat melalui prinsip swakelola meningkat.
3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, serta Pemeliharaan sarana dan Prasarana ekonomi masyarakat Desa.
4. Pengembangan Produk Unggul Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa.

bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan nyatanya program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan Desa sebagaimana diatur berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya sehingga daerah kesulitan mengintegrasikan kebijakan program

pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan program pembangunan Desa sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah diperlukan *intervensi regulation* Pemerintah Daerah guna mengarahkan program Desa mengacu pada kebijakan pembangunan Daerah. (Budiman Rusli dkk,2018).

Penelitian ini menunjukkan hubungan antara program dana desa untuk kualitas hidup dan perekonomian masyarakat dengan melihat kualitas sumber daya manusia untuk Provinsi Sumatera Utara. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Dana Desa Terhadap Kualitas Hidup Dan Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan Program Dana Desa masih belum merata di setiap desa sehingga terhambatnya keberlanjutan pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi.
2. Minimnya aksesibilitas masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam produktifitas sumber daya manusia.
3. Rendahnya kualitas hidup masyarakat mempengaruhi sumber daya tenaga kerja terhadap target pembangunan ekonomi.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Ada banyak yang dapat diangkat dari penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah. Jadi, penelitian ini hanya dibatasi pada masalah seberapa besar dampak program dana desa untuk kualitas hidup dan ekonomi masyarakat

khususnya pengeluaran Dana Desa pemerintah untuk Program Kualitas Hidup dan Ekonomi.

1.3.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan kualitas hidup masyarakat tingkat Kabupaten di Sumatera Utara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa pasca kebijakan dana desa untuk kabupaten Sumatera Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang Indeks Pembangunan manusia Untuk Kabupaten seProvinsi Sumatera Utara.
2. Melakukan estimasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Desa pasca kebijakan dana desa untuk Kabupaten seProvinsi Sumatera Utara .

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi pihak-pihak Yang berkepentingan dengan bidang kesehatan, bidang ekonomi dan sumber daya manusia maupun kalangan masyarakat umum.

Manfaat yang dapat diambil diantaranya:

1. Manfaat Akademik
 - a. Bagi peneliti:
 - (1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.

(2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi mahasiswa:

(1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.

(2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

2. Manfaat Non-akademik

a. Sebagai bahan masukan pemerintah dalam penetapan kebijakan Dana Desa.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Teori Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional “*National Income*” (NI) adalah jumlah pendapatan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun, istilah pendapatan nasional mewakili Gross Domestic Product (GDP) / Produk Domestik Bruto (PDB) dan Gross National Product (GNP) / Produk Nasional Bruto.

1. Gros Domestic Product (GDP) / Produk Domestik Brutp (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleg faktor produksi dalam negeri dan luar negeri atau nilai barang dan jasa dalam negara yang diproduksi oleh faktor produksi milik negara tersebut dan warga negara asing.
2. Gross National Product (GNP) / Produk Nasional Bruto (PNB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi domestik ditambah faktor produksi domestic diluar negeri.

Rumus sebagai berikut:

$$\text{GDP} = \text{GNP} - \text{Pendapatan Netto terhadap LN} \dots \dots \dots (2-1)$$

3. Net National Product (NNP) Produk Nasional Neto diperoleh dari Produk Nasional Bruto (GNP) dikurangi dengan penyusutan barang modal (capital goods) untuk mendapatkan nilai bersih.

Rumus sebagai berikut:

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Penyusutan (replacement)} \dots \dots \dots (2-2)$$

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross.

Teori pengeluaran pemerintah memiliki dua jenis teori yaitu teori mikro pengeluaran pemerintah dan teori makro pengeluaran pemerintah. Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah ini mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersediannya barang publik. Pada teori makro pengeluaran pemerintah ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti, model pembangunan tentang perkembangan pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



Wagner mengemukakan sebuah teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang lebih dikenal dengan sebutan hukum Wagner, yaitu semakin besar terhadap GNP. Menurut Wagner, jika dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam model mikro menjelaskan perubahan secara particular komponen-komponen pengeluaran pemerintah. sedangkan Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.
3. Teori Peacock & Wiseman

2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi

A. Teori pembangunan W.W. Rostow (1993)

mengulas mengenai lima tahap pembangunan. Rostow berpendapat bahwa proses pembangunan dalam masyarakat tumbuh bergerak lurus, yakni dari

masyarakat terbelakang ke masyarakat yang lebih maju. Proses pertumbuhan ini mengalami fase yang cukup lama. Teori pembangunan ekonomi dari Rostow ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* (Maret 1956) dan kemudian dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan ke dalam model jenjang linear (linear stages mode). Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap :

- 1) Masyarakat tradisional (the traditional society),
- 2) Prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off),
- 3) Tinggal landas (the take-off),
- 4) Menuju kekedewasaan (the drive to maturity), dan
- 5) Masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption)

Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah:

- 1) Karakteristik perubahan keadaan ekonomi,
- 2) sosial, dan
- 3) politik, yang terjadi.

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja.

Menurut Rostow, disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain:

- (1) perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
- (2) perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
- (3) perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif.
- (4) perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap pertasi perorangan dan sebagainya).

B. TEORI KLASIK:

1. Adam Smith (1723 - 1790)

Adam Smith ternyata bukan saja terkenal sebagai pelopor pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan *laissez-faire*, tetapi juga merupakan ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah dipahami, kita bedakan dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a. pertumbuhan output total
- b. pertumbuhan penduduk

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu:

- 1. sumberdaya alam yang tersedia (atau faktor produksi "tanah")
- 2. sumberdaya insani (atau jumlah penduduk)
- 3. stok barang modal yang ada.

2. David Ricardo (1772 - 1823)

Garis besar proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Teori Ricardo ini diungkapkan pertama kali dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1817. Proses Pertumbuhan Sebelum membicarakan aspek-aspek pertumbuhan dari Ricardo, terlebih dulu kita coba untuk mengenai ciri-ciri perekonomian Ricardo sebagai berikut:

- a) Jumlah tanah terbatas.
- b) Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah =natural wage).

- c) Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi.
- d) Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu.
- e) Sektor pertanian dominan.

C. TEORI NEO KLASIK (SOLOW-SWAN)

Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi Klasik. Ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow (Massachusetts Institute of Technology) dan Trevor Swan (The Australian National University). Solow ini memenangkan hadiah Nobel Ekonomi tahun 1987 atas karyanya tentang teori pertumbuhan ekonomi ini.

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya

pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka panjang.

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (capital-output ratio = COR) bisa berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya "keluwesan" (fleksibilitas) ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

D. TEORI KEYNESIAN (Harrod-Domar)

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan R. F. Harrod. Domar mengemukakan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam jurnal *American Economic Review*, sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*. Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendi-sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang ini dikenal sebagai teori Harrod-Domar.

Teori Harrod-Domar itu merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat

yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap (*steady growth*).

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu:

- 1) perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang - barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- 2) terdiri dari 2 sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
- 3) besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- 4) kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*).

Todaro (Arsyad 1999:5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi: 1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*); 2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia dan 3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan oleh perubahan struktural. Perubahan tersebut

terjadi pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994) pembangunan ekonomi adalah suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Todaro (1994) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pembrantasan kemiskinan.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo.

Menurut Prof.Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideology terhadap berbagai keadaan yang ada.

Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi Terbagi Dua Aliran:

1. Aliran Klasik (Adam Smith)

Mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku *Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations* Tahun 1776.

Menurut Adam Smith ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan.

2. Aliran Klasik (David Ricardo)

Mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku *The Principles Of Political Economy And Taxation*. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk ,di mana bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja dan membutuhkan tanah atau alam.

3. Aliran Neo Klasik (Harrod Domar)

Menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (Steady Growth), dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan oleh Harrod Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa hal berikut:

- Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment.
- Perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga (konsumen) dan sektor perusahaan (produsen)
- Fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan proposional dengan pendapatan

2.2 Kebijakan/ Regulasi

2.2.1 Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menaikkan dan menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Kebijakan fiskal sering disebut sebagai kebijakan anggaran karena mengakibatkan perubahan angka-angka dalam APBN.

Menurut J.M.Keynes, kebijakkan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relative serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Desentralisasi Fiskal bertujuan (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pemda, (2) memenuhi aspirasi daerah, memprbaiki struktur fiskal dan mobilisasi pendapatan secara regional maupun

nasional, (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat-tingkat daerah, (4) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah

Kebijakan Fiskal dibedakan menjadi:

1. Kebijakan Anggaran Seimbang yakni kebijakkan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan, bahwa jumlah pengeluaran yang disusun tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat.
2. Kebijakan Anggaran Surplus yakni Kebijakkan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih kecil dari pada penerimaan, pada umumnya dilakukan untuk mencegah inflasi.
3. Kebijakan Anggaran Defisit yakni kebijakan anggaran yang menyusun jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan, digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Kebijakan Anggaran Dinamis yakni kebijakan anggaran yang terus menerus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis), banyaknya kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara.

2.2.2 Otonomi Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikepada asal-usulnya. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan pemerintahan yang kecil disetiap daerah yang telah ada,

sebelum Indonesia ini terbentuk sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan desa yang mampu menyejahterakan rakyat tataran bawah.

Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh desa, dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata lebih tinggi. Sedangkan hak bawaan merupakan hak yang diperoleh oleh unit pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Desa, terdapat asas-asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan:

1. Asas Pengakuan, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
2. Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat.
3. Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disamping itu, tujuan dari adanya otonomi desa, pada pasal 4 :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat.
4. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab.

2.2.3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana Desa. Dimana dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang 1945 Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh kesehatan.

- (2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapa pun.

- UUD 1945 pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

2.2.4 Peraturan Tentang Dana Desa

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Desa terdapat pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 212 ayat(3) mengenai keuangan desa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga

Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan pengelolaan keuangan DD diatur dalam peraturan pemerintah menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2015 pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 96 ayat (1) dan (2) pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota DD setiap tahun, DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima. Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- c. Meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- e. Mendorong peningkatan pemberdayaan dan gotongroyong masyarakat.

f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik kampung (BUMK).

2.2.5 Program Dana Desa

Program/perencanaan (*planning*) yaitu fungsi dasar (*Fundamental*) manajemen, karena *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* pun Harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis, perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan di ketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah “memilih”. Artinya memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada.

Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan.⁷ Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat Kunarjo program didefinisikan secara teknis. sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek.

Sementara itu menurut Jones program adalah terjemahan dari doktrin kedalam pola-pola tindakan yang nyata dari energi-energi dan sumber-sumber daya lainnya di dalam lembaga itu sendiri dan berhubungan dengan lingkungan ekstern. Perencanaan menurut Williams, perencanaan adalah proses untuk mengantisipasi dan mengubah sesuatu yang belum terjadi,

melihat jauh ke depan, mencari solusi yang optimal, yang dirancang untuk meningkatkan dan idealnya memaksimalkan manfaat pembangunan secara pasti dan yang akan menghasilkan hasil yang diprediksi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Sumber informasi yang dipakai penulis juga dari penelitian terdahulu mengenai Program Dana Desa Terhadap Meningkatkan Kualitas Hidup dan Ekonomi Masyarakat. Untuk membantu penulis dalam penelitian ini maka penulis melihat beberapa penelitian terdahulu yakni.

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

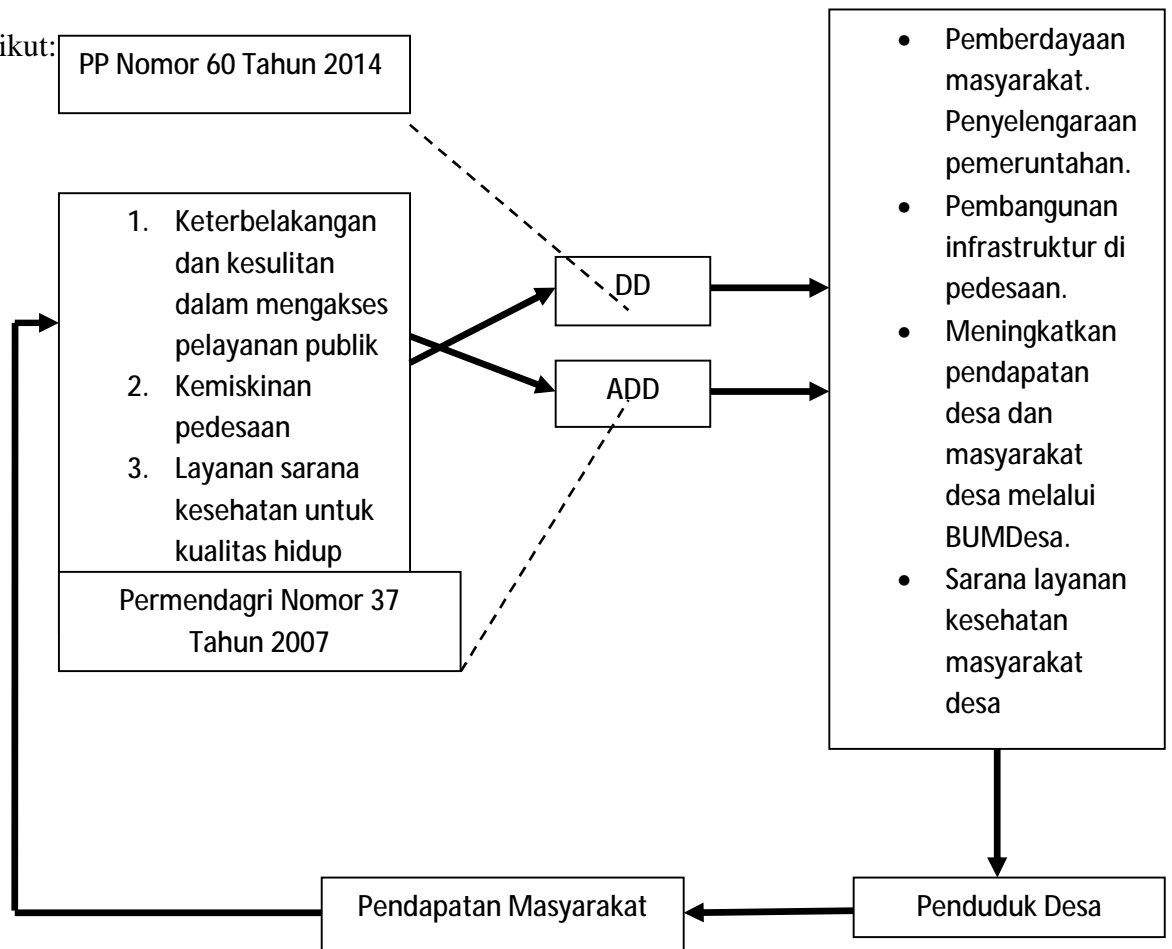
No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Model Estimasi	Hasil Penelitian
1.	Handra (2017) melakukan penelitian mengenai Analisis Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan	Indeks pembangunan manusia Jumlah Penduduk Miskin Indeks Pembangunan Manusia	OLS	Hasil menunjukkan dana desa dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan, mengingat keberagaman desa sangat besar antar daerah, bahkan didalam suatu wilayah provinsi
2.	Azwardi (2014) melakukan penelitian mengenai Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan	Rincian Penyaluran ADD Indeks Kualitas Manusia	OLS	penyaluran dana ADD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menganggarkan, terjadinya ketimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD
3.	Risma (2017) melakukan penelitian mengenai Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro	Rincian Anggaran Dana Desa Kab/Kota Tingkat Perekonomian Kab/Kota Indeks Pembangunan Manusia	OLS	Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah program –

	Kabupaten Pangkep			program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa.
4.	Rahayu (2017) melakukan penelitian mengenai Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang	Indeks Perekonomian Indeks Pembangunan Manusia Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur	OLS	Perkembangan infrastruktur desa setelah adanya Dana Desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui Pengelolaan Dana Desa.
5.	Karimah Dkk (2014), meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).	Indeks Kualitas Manusia Indeks Pembangunan Manusia Pengeluaran Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat	OLS	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan

2.4 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan sebagai

berikut:



Gambar 2.2: Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis. Jelas dan dapat diuji, hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 terdapat pengaruh positif dan Signifikan antara IPM, Jumlah Penduduk, PDRB, Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD).

H_0 tidak terdapat pengaruh positif dan Signifikan antara IPM, Jumlah Penduduk, PDRB, Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Desa (IPD).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penulisan adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dan sebuah penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian terapan yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Berdasarkan metode, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungannya.(Kuncoro, 2013)

3.1 Pendekatan Penelitian

Penulisan ini merupakan sebuah miniriset kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang disajikan adalah *panel data* yaitu dimana penelitian menggunakan data *cross section*, data yang diteliti lebih dari satu *time series*, waktu yang dihimpun pada tahun yang berbeda secara bersama. Data yang akan diteliti adalah provinsi Sumatera Utara dan waktu penelitian yang dihimpun adalah pada tahun 2016 sampai 2019 yang akan dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik. Adapun variabel-variabel yang akan diamati adalah variabel-variabel yang terdapat pada indeks pembangunan manusia yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melalui Dana Desa untuk masyarakat.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Desa, Dana Desa (DD), Jumlah Penduduk (JP) Pendapatan Perkapita (PDRB) Provinsi Sumatera Utara dan Indeks Pembangunan manusia (IPM).

Tabel 3-1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Status tingkat Indeks Pembangunan Desa Kabupaten	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id
Dana Desa (DD)	Besar dana desa yang diterima dalam satuan (rupiah)	Kementrian Keuangan www.kemenkeu.go.id
Jumlah Penduduk (JP)	Jumlah penduduk kabupaten dalam (jiwa)	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id
PDRB Kabupaten	Jumlah PDRB kabupaten se Provinsi Sumatera Utara dalam satuan (jutaan rupiah)	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten seProvinsi Sumatera Utara (0,00%).	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id

3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data Indeks Pembangunan Desa di Kabupaten SeProvinsi Sumatera Utara pada tahun 2014-2018 yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini direncanakan selama 4 bulan yaitu Desember 2019 sampai Mei 2020.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber yaitu data sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Berdasarkan bentuk adalah data kuantitatif, data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sedangkan berdasarkan waktu adalah data panel, merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu (Kuncoro, 2013).

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id , dan Kementerian Keuanga www.kemenkeu.go.id melalui *website* resmi.

3.5 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data melalui website - website resmi kementerian keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), yang berupa data silang tempat (*cross section*) dengan objek penelitian kabupaten seprovinsi Sumatera

Utara dan juga data runtut waktu (*time series*). Kemudian Penelitian kepustakaan (*library research*) juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat menunjang dan dapat digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji literatur-literatur yang tersedia seperti buku, jurnal, dan artikel yang menyangkut Program Dana Desa dan Indeks Pembangunan Desa.

3.6 Model Estimasi

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel untuk menggabungkan data *cross section* dan data *time series*. Dengan digabungkannya kedua data tersebut, diharapkan data panel menjadi lebih informatif, bervariasi, mengurangi kolinearitas, memperbanyak derajat bebas dan lebih efisien. Persamaan regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

$$IPD_{rt} = \beta_0 + \beta_1 \cdot DD_{rt} + \beta_2 \cdot JP_{rt} + \beta_3 \cdot PDRB_{rt} + \beta_4 \cdot IPM_{rt} + \varepsilon_{rt}$$

.....(3-1)

Dimana:

IPD = Indeks Pembangunan Desa

DD_{rt} = Dana Desa

JP_{rt} = Jumlah Penduduk Per Kabupaten

PDRB_{rt} = Produk Domestik Regional Bruto

IPM_{rt} = Indeks Pembangunan manusia

r = Kabupaten (Region) Se Provinsi Sumatera Utara

t = Unit Waktu (tahun)

β₀ = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Parameter dari setiap variabel bebas

ε_{it} = *Error Term*

3.7 Metode estimasi

penelitian ini mengenai Evaluasi Program Dana Desa terhadap Kualitas Hidup dan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Provinsi Sumatera Utara, menggunakan data panel yaitu data silang tempat (*cross Section*) dengan objek penelitian Kabupaten seProvinsi Sumatera Utara dan juga data runtut waktu (*time series*) dalam kurun waktu 4 tahun (dari tahun 2016 sampai 2018) Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan model regresi linier untuk model regresi linier dengan asumsi OLS (*ordinary least square methode*) dalam bentuk model regresi linier berganda serta menggunakan *Eviews8* yang disajikan lebih sederhana dan mudah dimengerti. (Damodar N.Gujarati, 2003)

Asumsi utama yang mendasari model regresi dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. $E(\varepsilon_i) = 0$; nilai rata-rata distrurbance trem adalah nol.
2. $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$; variasi dari distrurbance trem adalah bersifat konstan (homokedastis)
3. $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$; tidak ada korelasi baik di antara distrurbance term maupun antara distrurbance term dan variabel bebas.
4. $U_j \sim N(0, \sigma^2)$; distrurbance term terdistribusi secara normal dengan rata-rata nol dan variasi konstan..

3.8 Prosedur Analisis

3.8.1 Metode analisis deskriptif

merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Desa Terhadap Standart Pelayanan Dasar untuk Masyarakat Di Kabupaten SeProvinsi Sumatera Utara pada tahun 2018, dan juga untuk mengetahui perkembangan perekonomian masyarakat Desa melalui program Dana Desa di Provinsi SUMUT. khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Perkapita Masyarakat (PDRB) di Kabupaten. Analisis deskriptif Evaluasi Program Dana Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa.

3.8.2 Metode Regresi Linier

1. Penaksiran

A. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, koefisien determinasi (R^2) menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas.

Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted* R^2 yang dirumuskan (Damodar N.Gujarati, 2003)

$$Adjusted R^2 = 1 - R^2 - \left(\frac{-1}{n-k} \right) \dots\dots\dots(3-2)$$

Dimana: R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah Sampel

k =Jumlah variabel independen

B. Korelasi (r)

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat tidaknya suatu hubungan linier antara dua variabel koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi antara -1 sampai +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut sedangkan tanda + (positif) dan – (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai + (positif) maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah, dalam arti lain peningkatan X akan bersamaan dengan peningkatan Y dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai – (negatif) artinya korelasi antara dua variabel tersebut bersifat berlawanan peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan nilai Y.

2. Pengujian (*Test Diagnostic*)

a). Uji Parsial (Uji t) Statistik

Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel

bebas (DD, JP, PDRB, IPM) secara parsial terhadap variabel terikat (IPD).

Nilai t dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\alpha_i}{se_{\alpha_i}} \dots\dots\dots(3-3)$$

dimana: α_i = koefisien regresi,

se = Standar eror

Dibandingkan dengan $t_{tabel} = \pm t (\alpha/2, n - 1)$

Kriteria Uji:

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$, hal lain tolak H_0

Atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut.



Atau dalam olahan *software*, dikatakan signifikan jika nilai sig $< \alpha = 5\%$

b.) Uji Simultan (Uji F)

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat pengaruh variable independen terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya variabel dependen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima artinya variabel Independen secara bersama-sama

tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(N-k)} \dots\dots\dots(3-4)$$

Dimana: K = Jumlah parameter yang diestimasi

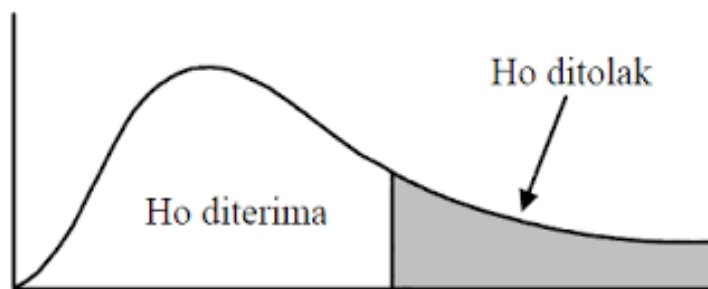
N = Jumlah Observasi

Dibanding dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n - k - 1)$

Kriteria Uji:

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam distribusi kurva F dalam digambarkan sebagai berikut.



Atau dalam olahan software dikatakan signifikan jika nilai sig < $\alpha = 5\%$.

C. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan OLS mensyaratkan pemenuhan beberapa asumsi (disebut asumsi klasik: Gauss-Markov). Jika asumsi ini dipenuhi, maka parameter yang diperoleh dengan OLS adalah bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Dalam praktiknya, sangat mungkin sekali satu atau lebih asumsi tersebut tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian estimator OLS tidak lagi BLUE. Pada kasus yang ekstrem, estimator dan/atau pengujian hipotesis bahkan tidak dapat dilakukan. Dalam bagian ini akan dibahas suatu pelanggaran asumsi klasik yang sering terjadi yakni

autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinearitas (Damodar N.Gujarati, 2003).

1. Autokorelasi

Autokorelasi adalah fenomena model (Vogelvang, 2005). timbul dari spesifikasi yang tidak tepat terhadap hubungan antara variabel endogonous dengan variabel penjelas. Akibat kurang memadainya spesifikasi maka dampak faktor yang tidak masuk ke dalam model akan terlihat pada pola residual. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson atau *Durbin Watson Test*. Dimana apabila d_L dan d_U adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada $2 < DW < 4 - d_U$ maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi atau *no-autocrorelation* (Damodar N.Gujarati, 2003).

2. Heteroskedastisitas

Asumsi penting (asumsi Gauss Markov) dalam penggunaan OLS adalah varians residual yang konstan. Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual disebut homokedastis, jika tidak, disebut heterokedastis (Damodar N.Gujarati, 2003).

Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan uji *white*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung X^2 dimana $X^2 = n * R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai *Probability Observation R-Square* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heterokedastisitas dalam model ditolak.

3. Multikolinearitas

Gujarati (2003) menyatakan bahwa multikolinearitas adalah fenomena sampling. Ia terjadi pada sampel dan bukan pada populasi. Hal ini tentu saja jika kita telah menspesifikasikan variabel yang masuk ke dalam model dengan benar (misalnya tidak ada variabel yang merupakan multiplikasi dari variabel lainnya). Dengan kata lain, jika dimungkinkan untuk bekerja pada populasi maka multikolinearitas tidak akan pernah menjadi suatu masalah (Damodar N.Gujarati, 2012).

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *auxilliary regression* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama

lebih dari R^2 regresi *auxilliary* maka di dalam model tidak terjadi multikolinearitas. Model *auxilliary regression* adalah:

$$F_t = \frac{R^2 \cdot X_1, X_2, X_3, \dots, X_k / (k-2)}{1 - R^2 \cdot X_1, X_2, X_3, \dots, X_k / (N-k+1)} \dots \dots \dots (3-5)$$

D. Uji Hausman

Uji yang digunakan untuk menentukan model regresi pada data panel yaitu *Fixed Effect* atau *Random Effect*, maka selanjutnya akan dilakukan uji signifikan antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*, untuk mengetahui model mana yang lebih tepat untuk digunakan, pengujian ini disebut dengan Uji Hausman.

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistic unuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang akan digunakan. Pengujian Uji Hausman dilakukan dengan Hipotesis berikut:

- H₀ : *Random Effect Model*
- H_a : *Fixed Effect Model*

Uji Hausman akan mengikuti distribusi chi-square sebgai beriku:

$$m = q \text{ Var } (q') - 1 \text{ } q'$$

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan *degree of freedom* sebanyak K, dimana K adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka Ho ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka, model yang tepat adalah model *Random Effect*.

1. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Efek tetap disini dimaksudkan bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu.

Demikian juga koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*Time Invariant*)

Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (*Dummy*). Oleh Karena itu, model ini sering disebut juga dengan *Lest Square Dummy Variabel (LSDV)*.

2. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel sama, metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek.

Namun untuk menganalisis metode efek random ini ada satu syarat, yaitu objek data silang harus lebih besar dari pada banyaknya koefisien (Damodar N.Gujarati, 2012)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sumatera Utara

4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis provinsi Sumatera Utara berada pada garis 1° - 4° lintang utara dan 98° - 100° bujur timur. Sumatera Utara memiliki jumlah daerah 33 Kabupaten/Kota yang ibu kotanya terletak di kota Medan. Provinsi Sumatera Utara memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang cukup besar sehingga daerah Kabupaten/Kota tersebut memiliki peluang investasi yang cukup menjanjikan.

Sumatera Utara merupakan provinsi yang berada di bagian barat Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki daratan dengan luas daratan $72.981,23 \text{ km}^2$ dan luas lautan $11.000.000 \text{ km}^2$. atau 3,72% dari luas wilayah republik Indonesia dengan jumlah penduduk 14.908.036 jiwa. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau dipantai timur dan 156 pulau di barat, memiliki 5.626 Desa/Kelurahan, 25 Kabupaten dan 8 kota.

Batas wilayah provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Negara Malaysia di Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Aceh

Setelah Otonomi Daerah tahun 2005, Provinsi Sumatera Utara memiliki 25 Kabupaten/Kota yang terdiri 18 kabupaten dan 7 kota. Jika dibandingkan dengan sebelum bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara

hanya terdapat 13 Kabupaten dan 6 Kota. Sepanjang tahun 2004-2006 jumlah kecamatan bertambah sebanyak 30 kecamatan dari 331 menjadi 361 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan bertambah sebanyak 129 desa/kelurahan dari 5.491 desa/kelurahan menjadi 5.620 desa/kelurahan. Provinsi Sumatera Utara merupakan Urutan ke 5 Provinsi tertua di Indonesia.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Provinsi Sumut



Sumber : www.sumutprov.go.id

Terletak diatas Permukaan laut. Kota Gunung Sitoli 0-600m, Kota Padang Sidempuan 260-1100m, Kota Binjai 0-28m, Kota Medan 2.5-37.5m, Kota Tebing Tinggi 26-34m, Kota Pematang Siantar 400-500m, Kota Tanjung Balai 0-3m, Kota Sibolga 0-50m, Kab.Nias Barat 0-80m, Kab.Nias Utara 0-478m, Kab.Labuhanbatu Utara 0-700m, Labuhanbatu Selatan 0-500m, Kab.Padang Lawas , Kab.Padang lawas Utara 0-1915m, Kab.Batu Bara 0-50m, Kab.Serdang Bedagai 0-500m, Kab.Samosir 904-2157m, Kab.Pakpak Barat 700-1500m,

Kab.Humbang Hasundutan 330-2075m, Kab.Nias Selatan 0-800m, Kab.Langkat 0-1200m, Kab.Deli Serdang 0-500m, Kab.Karo 120-1420m, Kab.Dairi 400-1600m, Kab.Simalungun 0-369m, Kab.Asahan 0-1000m, Kab.Labuhanbatu 0-700m, Kab.Toba Samosir 900-2200m, Kab.Tapanuli Utara 150-1700m, Kab.Tapanuli Tengah 0-1266m, Kab.Tapanuli Selatan 0-1915m, Kab.Mandailing Natal 0-1000m, Kab.Nias 0-800m.

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara 2018

No	Kabupaten/Kota	Luas	Persentasi
1	Nias	1.842,51	2,52
2	Mandailing Natal	6.134,00	8,40
3	Tapanuli Selatan	6.030,47	8,26
4	Tapanuli Tengah	2.188,00	3,00
5	Tapanuli Utara	3.791,64	5,20
6	Toba Samosir	2.328,89	3,19
7	Labuhan Batu	2.156,02	2,95
8	Asahan	3.702,02	5,07
9	Simalungun	4.369,00	5,99
10	Dairi	1.927,80	2,62
11	Karo	2.127,00	2,91
12	Deli Serdang	2.241,68	3,07
13	Langkat	6.262,00	8,58
14	Nias Selatan	1.825,20	2,50
15	Humbang Hasudutan	2.335,35	3,20
16	Pakpak Barat	1.218,30	1,67
17	Samosir	2.069,05	2,84
18	Serdang Bedagai	1.900,22	2,60
19	Batu Bara	922,20	1,26
20	Padang Lawas	3.892,02	5,33
21	Padang Lawas Utara	3.918,05	5,37
22	Labuhan Batu Selatan	3.596,00	4,93
23	Labuhan Batu Utara	3.570,98	4,89
24	Nias Utara	1.202,78	1,65
25	Nias Barat	473,73	0,65
	Sumatera Utara	72.025,09	100,00

Berdasarkan luas daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang luas terbesar adalah kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00km² atau sekitar 8,50 persen dari total luas provinsi Sumatera Utara, diikuti kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.030,00Km² atau 8,26 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kota Tebing Tinggi dengan luas lahan 31,00km² atau sekitar 0,04 persen dan diikuti oleh kota Binjai dengan luas 51,19 atau 0,08 persen dari total luas wilayah provinsi Sumatera Utara.

4.1.2 Kondisi Topografi

Secara umum topografi di Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Kawasan pantai barat terdiri dari 12 Kabupaten/Kota (Kabupaten Nias, Nias utara, Nias barat, Mandailing natal, Tapanuli selatan, Padang lawas, Padang lawas utara, Tapanuli tengah, Nias selatan, dan Kota Padang sidempuan, Sibolga dan Gunung sitoli). Potensi utama adalah pertanian pangan, perkebunan rakyat, perkebunan besar, perikanan, pertambakan, perternakan unggas, dan pariwisata.
2. Kawasan pantai timur terdiri dari 12 Kabupaten/Kota (Kabupaten Labuhan batu, Labuhan batu utara, Labuhan batu selatan , Asahan, Batu bara, Deli serdang, Langkat, Serdang berdagai, dan Kota Tanjung Balai, Tebing tinggi, Medan dan Binjai). Potensi utama adalah pertanian, perkebunan rakyat, perkebunan besar, industry, dan perdagangan.

3. Kawasan dataran tinggi terdiri dari 9 Kabupaten/Kota (Kabupaten Tapanuli utara, Toba samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang hasudutan, Pakpak barat, Samosir dan Kota Pematang Siantar). Potensi utama adalah pertanian rakyat, perkebunan dan peternakan.

4.1.3 Kondisi Demografi

Provinsi Sumatera Utara dihuni penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu seperti melayu, karo, simalungun, mandailing, batak, jawa, minang, cina, aceh, dan suku lainnya. Dengan jumlah pemeluk agama terbesar adalah islam, Kristen hindu, dan budha. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi yang cukup kompleks. Berikut penduduk menurut jenis kelamin.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten seProvinsi Sumatera Utara Tahun 2018

NO	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ratio
1	Nias	69191	72919	142110	95
2	Mandailing Natal	215704	223801	439505	96
3	Tapanuli Selatan	138486	140101	278587	99
4	Tapanuli Tengah	182607	108198	363705	101
5	Tapanuli Utara	147110	150696	297806	98
6	Toba Samosir	90297	91493	181790	99
7	Labuhan Batu	241800	236793	478593	102
8	Asahan	360901	357817	718718	101
9	Simalungun	428105	431123	859228	99
10	Dairi	140798	142078	281876	100
11	Karo	200122	203085	403207	99

12	Deli Serdang	1064206	1050421	2114627	101
13	Langkat	517804	510505	1028309	101
14	Nias Selatan	156205	158190	314395	99
15	Humbang Hasudutan	92701	93992	186693	99
16	Pakpak Barat	23793	23390	47183	102
17	Samosir	62214	62885	125099	99
18	Serdang Bedagai	307722	305202	612924	101
19	Batu Bara	205818	203273	409091	101
20	Padang Lawas	135210	134589	262895	100
21	Padang Lawas Utara	131987	130908	269799	101
22	Labuhan Batu Selatan	166703	160122	326825	104
23	Labuhan Batu Utara	180682	177009	357691	102
24	Nias Utara	67282	68808	136090	98
25	Nias Barat	38860	42419	81279	92
	Total	5.374,534	5.479,817	12.398,325	100

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 tercatat 14.262,147 jiwa dengan rincian 7.116,896 jiwa penduduk laki-laki dan 7.145,251 jiwa penduduk perempuan. Maka diatas bahwa Kabupaten/Kota yang paling banyak penduduknya adalah kabupaten Deli Serdang dengan jumlah penduduknya 2.114,627 jiwa hal ini disebabkan karena daerah Deli Serdang sangat potensial baik posisi geografis dan aksesibilitas yang cukup strategis yang mengelilingi kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara. Dan Kabupaten/Kota yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Nias barat dengan 81.279 jiwa hal ini terjadi karena di pulau Nias telah dimekarkan terjadi 4 bagian dan salah satunya Nias barat yang menjadi salah satu faktor sedikitnya jumlah penduduknya.

Kabupaten Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat Jumlah Penduduk dan perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2015-2019 dapat dilihat Pada Grafik berikut.



Jumlah penduduk yang terus mengalami pertumbuhan akan semakin meningkatkan kepadatan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat mendorong angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena penambahan jumlah tenaga kerja, di sisi lain pertumbuhan penduduk juga dapat menjadi penghambat bagi tingkat PDRB apabila terus dibarengi dengan faktor-faktor produksi lainnya. Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan pertumbuhan akan semakin meningkatkan kepadatan penduduk.

4.1.4 Kondisi Ekonomi

A. PDRB Kabupaten Provinsi Sumatera Utara

Potensi ekonomi sangat penting pada pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, caranya dengan distribusi yang mendominasi di wilayah/daerah tersebut dan mengembangkan untuk mendorong distribusi yang

lain agar terdorong maju dan berkembang dengan tujuan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah untuk mengatur dan mengelola dengan mengembangkan distribusi tersebut. Untuk melihat perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB dari segi lapangan usaha yang mendominasi.

Tabel 4.3
PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
	Triw II-2019 (1)	Triw III-2019 (2)	Triw II-2019 (3)	Triw III-2019 (4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40 401 484,16	41 905 239,93	33 071 023,81	34 304 267,38
B. Pertambangan dan Penggalian	2 487 492,54	2 597 040,80	1 755 498,20	1 804 668,46
C. Industri Pengolahan	37 417 670,70	38 531 333,34	23 976 232,58	24 732 546,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	225 382,91	228 628,11	180 652,71	183 260,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	198 775,93	201 470,88	128 883,18	130 602,83
F. Konstruksi	28 008 166,47	28 944 833,03	17 054 123,55	17 593 033,85
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37 514 979,01	39 237 873,58	23 996 975,25	24 757 079,83
H. Transportasi dan Pergudangan	10 065 192,42	10 334 899,83	6 399 746,44	6 557 164,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4 799 921,19	4 907 898,99	3 273 156,11	3 341 757,81
J. Informasi dan Komunikasi	4 213 337,10	4 377 285,00	3 808 595,10	3 911 808,03
K. Jasa Keuangan	5 822 680,28	5 846 169,20	3 770 398,48	3 795 235,71
L. Real Estat	10 057 652,10	10 462 206,48	5 665 549,38	5 788 491,80
M, N. Jasa Perusahaan	2 118 201,63	2 247 672,17	1 227 083,83	1 258 129,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7 477 114,61	7 530 821,07	4 391 834,99	4 515 918,26
P. Jasa Pendidikan	3 605 497,38	3 767 662,81	2 712 504,69	2 773 536,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 982 638,46	2 073 714,33	1 283 193,98	1 315 787,10
R, S, T, U. Jasa Lainnya	1 154 401,88	1 203 604,96	696 197,61	709 982,33
PDRB	197 550 588,78	204 398 354,49	133 391 429,90	137 473 259,25

Sumber : BPS Prov.Sumatera Utara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara atas harga berlaku dan harga konstan 2010 selama tahun 2019 yang dijelaskan Pada table Berikut:

Dari table PDRB Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat kita lihat jumlah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada triwulan II tahun 2019 totalnya mencapai 197 550 588,78 miliar sedangkan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) pada Triwulan II tahun 2019 total mencapai 133 391 429,90 miliar. Kemudian Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada triwulan III tahun 2019 totalnya mencapai 204 398 354,49 miliar, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan 2010(ADHK) pada triwula III tahun 2019 totalnya mencapai 137 473 259,25 miliar.

Berdasarkan data di atas PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 distribusi pertanian, kehutanan dan perikanan yang lebih mendominasi di provinsi sumatera utara dengan jumlah harga berlaku sebesar Rp 41.905.239,93 dan harga konstan Rp34.304. 267,38 dan di urutan kedua distribusi industri pengolahan jumlah harga berlaku sebesar Rp 38.531.333,34 dan dengan harga konstan Rp 24.732.545,96. Sedangkan distribusi yang paling rendah adalah distribusi pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai harga berlaku sebesar Rp 201.470,88 dan harga konstan Rp 130.602,83.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan daerah tersebut, terjadinya pertumbuhan PDRB suatu daerah dapat disebabkan dari meningkatnya kontribusi salah satu subsektor yang ada pada daerah tersebut. Berikut grafik laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Harga Konstan 2010.

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten (persen), Tahun 2016 – 2019

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018
1	Nias	5,03	5,01	4,95
2	Mandailing Natal	6,18	5,02	4,96
3	Tapanuli Selatan	5,12	5,03	4,97
4	Tapanuli Tengah	5,12	5,04	4,98
5	Tapanuli Utara	4,12	5,05	4,99
6	Toba Samosir	4,76	5,06	4,100
7	Labuhan Batu	5,06	5,07	4,101
8	Asahan	5,62	5,08	4,102
9	Simalungun	5,40	5,09	4,103
10	Dairi	5,41	5,10	4,104
11	Karo	5,42	5,11	4,105
12	Deli Serdang	5,43	5,12	4,106
13	Langkat	5,44	5,13	4,107
14	Nias Selatan	5,45	4,56	4,108
15	Humbang Hasudutan	5,46	4,57	4,109
16	Pakpak Barat	5,47	4,58	5,85
17	Samosir	5,27	4,59	5,86
18	Serdang Bedagai	5,28	4,60	5,87
19	Batu Bara	5,29	4,61	5,88
20	Padang Lawas <u>Utara</u>	5,30	4,62	5,89
21	Padang Lawas	5,31	4,63	5,90
22	Labuhan Batu Selatan	5,32	4,64	5,91
23	Labuhan Batu Utara	5,33	4,65	5,92
24	Nias Utara	5,34	4,66	5,93
25	Nias Barat	5,35	4,67	5,94
	Sumatera Utara	5,18	5,58	5,103

Pada table 4.4 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan sebesar

5,18 pada tahun ini laju pertumbuhan sudah mulai sedikit meningkat. Tahun 2017 s/d 2018 laju pertumbuhan mulai meningkat disebabkan 3 sektor yaitu (1) perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil, sepeda motor (2) pertanian, perikanan, kehutanan dan (3) industry.

4.1.5 Perkembangan IPM Sumatera Utara Tahun 2010-2018

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018.

Grafik 4.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara, Tahun 2010-2018



Sumber : BPS Indeks Pembangunan Manusia SUMUT 2018

IPM Sumatera Utara meningkat dari 67,09 pada tahun 2010 menjadi 71,18 pada tahun 2018. Selama periode tersebut, IPM Sumatera Utara rata-rata tumbuh sebesar 0,76 persen per tahun. Pada periode 2010-2018, IPM Sumatera Utara tumbuh 0,86 persen. Selama periode 2010 hingga 2018, IPM Sumatera Utara

menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Sumatera Utara mengalami peningkatan. Pembangunan manusia Sumatera Utara telah berstatus “tinggi” mulai tahun 2016. Sementara selama periode 2010 hingga 2015 pembangunan manusia Sumatera Utara hanya berstatus “sedang”.

Tabel 4.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017-2018

Kabupaten/ Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM		
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Capaian	Pertumbuhan (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Nias	69,18	69,43	12,12	12,13	4,93	4,94	6 629	6 941	60,21	60,62	1,01
Mandailing Natal	61,97	62,24	12,99	13,15	8,00	8,11	9 385	9 653	65,13	65,83	1,07
Tapanuli Selatan	64,28	64,55	13,08	13,10	8,67	8,70	10 955	11 209	68,69	69,10	0,60
Tapanuli Tengah	66,66	66,82	12,65	12,66	8,28	8,29	9 852	10 067	67,96	68,27	0,46
Tapanuli Utara	67,86	68,11	13,65	13,66	9,46	9,65	11 407	11 607	72,38	72,91	0,73
Toba Samosir	69,36	69,59	13,25	13,26	10,10	10,34	11 846	12 095	73,87	74,48	0,83
Labuhan Batu	69,44	69,60	12,59	12,60	9,01	9,04	10 760	11 053	71,00	71,39	0,55
Asahan	67,57	67,79	12,53	12,56	8,46	8,47	10 477	10 735	69,10	69,49	0,56
Simalungun	70,53	70,75	12,71	12,75	8,95	9,18	11 055	11 311	71,83	72,49	0,92
Dairi	68,13	68,41	13,06	13,07	8,90	9,15	10 395	10 492	70,36	70,89	0,75
Karo	70,77	70,97	12,71	12,73	9,54	9,55	12 059	12 367	73,53	73,91	0,52
Deli Serdang	71,11	71,31	12,90	13,32	9,70	9,92	11 891	12 132	73,94	74,92	1,33
Langkat	67,94	68,22	12,72	12,75	8,51	8,52	10 784	11 068	69,82	70,27	0,64
Nias Selatan	68,00	68,24	11,98	12,20	4,95	5,20	6 792	6 941	59,85	60,75	1,50
Humbang Hasundutan	68,41	68,69	13,24	13,25	9,10	9,28	7 412	7 630	67,30	67,96	0,98
Pakpak Bharat	65,05	65,27	13,82	13,83	8,47	8,48	7 913	8 099	66,25	66,63	0,57
Samosir	70,68	70,87	13,43	13,44	8,95	9,14	8 163	8 348	69,43	69,99	0,81
Serdang Bedagai	67,79	68,08	12,55	12,57	8,35	8,51	10 551	10 737	69,16	69,69	0,77
Batu Bara	66,10	66,38	12,49	12,52	7,83	7,84	10 084	10 385	67,20	67,67	0,70
Padang Lawas Utara	66,58	66,77	12,41	12,42	8,93	9,06	9 737	9 912	68,34	68,77	0,63
Padang Lawas	66,50	66,69	12,99	13,00	8,43	8,67	8 445	8 772	66,82	67,59	1,15
Labuhan Batu Selatan	68,14	68,39	12,95	12,97	8,70	8,71	10 892	11 280	70,48	70,98	0,71
Labuhan Batu Utara	68,91	69,09	12,79	12,80	8,34	8,35	11 510	11 730	70,79	71,08	0,41
Nias Utara	68,77	68,98	12,57	12,58	6,08	6,09	5 835	6 041	60,57	61,08	0,84
Nias Barat	68,28	68,50	12,61	12,66	5,78	6,00	5 594	5 817	59,56	60,42	1,44
Sibolga	68,05	68,36	13,12	13,13	9,87	9,91	11 221	11 405	72,28	72,65	0,51
Tanjung Balai	62,28	62,60	12,44	12,47	9,14	9,24	10 778	11 102	67,41	68,00	0,88
Pematang Siantar	72,63	72,93	14,01	14,02	11,06	11,08	12 106	12 290	77,54	77,88	0,44
Tebing Tinggi	70,28	70,47	12,66	12,68	10,09	10,24	12 055	12 434	73,90	74,50	0,81
Medan	72,40	72,64	14,45	14,72	11,25	11,37	14 613	14 845	79,98	80,65	0,84
Binjai	71,75	71,95	13,58	13,59	10,58	10,75	10 487	10 750	74,65	75,21	0,75
Padangsidempuan	68,41	68,73	14,50	14,51	10,56	10,63	10 464	10 795	73,61	74,38	0,77
Gunungsitoli	70,42	70,67	13,69	13,71	8,40	8,41	7 300	7 639	67,68	68,33	0,96
Sumatera Utara	68,37	68,61	13,10	13,14	9,25	9,34	10 036	10 391	70,57	71,18	0,86

Sumber: BPS Sumatera Utara 2018

Dari data diatas Untuk melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten seProvinsi Sumatera Utara dengan melihat peningkatan variabel dalam pengukuran IPM di wilayah. Untuk varibael Umur Harapan Hidup kabupaten Deli Serdang dengan nilai tertinggi 71,31 dan terendah kabupaten Mandailing Natal dengan nilai 62,24. Kemudian Standar Hidup layak kabupaten pakpak barat yang tertinggi sebesar 13,83 dan kabupaten terendah

adalah Nias dengan nilai 12,13 sedangkan diukur dari variabel Rata Lama Sekolah kabupaten Toba Samosir dengan nilai 10,34 dan kabupaten Nias yang terendah dengan nilai 4,94 dan variabel pengeluaran per kapita kabupaten karo dengan nilai sebesar 12.367 dan terendah adalah kabupaten nias sebesar 6.941

Capaian pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten se- Provinsi Sumatera Utara adalah kabupaten Deli Serdang dimana tahun 2017 capaian 73,94 menjadi 74,92 pada tahun 2018 dan kabupaten Toba Samosir di posisi kedua dimana tahun 2017 mencapai 73,87 menjadi 74,48 dari data diatas menunjukkan bahwa capaian untuk peningkatan IPM semakin baik di tiap-tiap daerah di Provinsi Sumatera Utara.

4.1.6 Gini Ratio

Gambar 4.4
Perkembangan *Gini Ratio* Sumatera Utara, September 2012 – Maret 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Prov Sumatera Utara
Gini Ratio Sumatera Utara pada September 2012 tercatat sebesar 0,331.

Selama periode September 2012 hingga Maret 2019, nilai *Gini Ratio* cukup berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada Maret 2013 yaitu sebesar 0,354. Periode selanjutnya turun hingga mencapai 0,310 pada September 2014, kemudian mengalami peningkatan kembali pada Maret 2015 menjadi 0,336 dan menurun kembali hingga mencapai angka 0,312 pada September 2016, akan tetapi mengalami peningkatan kembali menjadi 0,315 pada Maret 2017 dan menjadi

0,335 pada September 2017. *Gini Ratio* Sumatera Utara pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,318 turun menjadi 0,311 pada September 2018, dan mengalami peningkatan kembali menjadi 0,317 pada Maret 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,338. Angka ini meningkat sebesar 0,008 poin dibanding *Gini Ratio* September 2018 yang sebesar 0,330. Untuk daerah perdesaan *Gini Ratio* Maret 2019 tercatat sebesar 0,264. Angka ini meningkat sebesar 0,007 poin dibanding *Gini Ratio* September 2018 yang sebesar 0,257.

4.1.7 Standart Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili Kualitas Hidup Manusia adalah standar hidup layak yang dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara mencapai 10,39 juta rupiah per tahun. Selama delapan tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar 1,62 persen per tahun.

Gambar 4.4 Pengeluaran per Kapita per Tahun Sumatera Utara, 2010-2018 (Rp000)



Sumber :BPS Sumatera Utara 2018

Dari data diatas menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat dari tahun 2010 dari 9,196 naik pada tahun 2018 menjadi 10,391. Hal ini merupakan suatu peningkatan yang baik dari masyarakat dimana sebagian besar sudah memacu untuk memperbaiki kualitas hidup dari segi pola hidup dan berpola pikir untuk hidup yang lebih layak. Semakin meningkatkan kualitas hidup yang

akan berpengaruh pada sumber daya manusia yang dimana semakin baik dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di setiap daerah.

4.2 Analisis Deskriptif

Perkembangan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dilihat dari pertumbuhan PDRB Sumatera Utara yang dimana meningkat setiap tahunnya. Distribusi Pertanian, Kehutanan dan perikanan yang merupakan distribusi yang paling berkembang di Sumatera Utara. Potensi ekonomi sangat penting pada pertumbuhan ekonomi daerah, dimana yang merupakan salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, caranya dengan mendongkrak distribusi yang mendominasi di wilayah/daerah Sumatera Utara dan mengembangkan untuk mendorong ditribusi yang lain agar terdorong maju dan berkembang dengan tujuan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan. dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara meningkat dari 67,09 pada tahun 2010 menjadi 71,18 pada tahun 2018 merupakan suatu peningkatan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Untuk pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara mencapai 10,39 juta rupiah per tahun. Selama delapan tahun terakhir, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar 1,62 persen per tahun. Dengan program yang ditunjukkan ke desa-desa dengan tujuan pemerataan pembangunan dan ekonomi. diterbitkan Undang-undang Desa Nomor 6 pemerintah daerah mulai mendorong pemerintahan desa untuk dapat mengelola dana anggaran untuk desa secara mandiri dan mengembangkan potensi yang dimiliki tiap daerah. sehingga dapat menjadi pusat perputaran ekonomi yang produktif dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

4.3 Estimasi Analisis Regresi

4.3.1 Penaksiran

a.) Koefisien Determinasi (R^2)

Melihat seberapa besar persentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase.

Pada penaksiran determinasi (R^2) didapat R-Squared 0,760532 yang berarti seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 76% dan sisanya 20,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

b.) Korelasi (R)

Berdasarkan hasil penaksiran korelasi dimana nilai Adjusted R Squared adalah nilai yang telah terkoreksi oleh nilai standart error, dalam penaksiran ini nilai adjusted r square sebesar 0.578410. sedangkan nilai standar error model regresi 5.441039 ditunjukkan dengan label *S.E.of regression*. Nilai standar error ini lebih kecil dari pada nilai standar deviasi variabel response yang ditunjukkan dengan "*S.D. dependent var*" yaitu sebesar 8.379862 yang dapat diartikan bahwa model regresi valid sebagai model secara signifikan.

4.3.2 Pengujian (*Test Diagnostic*)

a.) Uji T Parsial

Uji t-parsial merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (JPK , IPM , DD , PDRB) secara parsial terhadap variabel terikat (IPD).

T parsial ditunjukkan dengan nilai t-Statistic, nilai T parsial IPM sebesar 4.060532 dengan P value dari t parsial IPM adalah 0,00002 dimana $< 0,05$ berarti variabel IPM berpengaruh kuat secara parsial di dalam model terhadap variabel IPD.

b.) Uji F Simultan

Uji ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Hasil uji F (simultan) diperoleh melalui perbandingan F-statistic/F-hitung dengan F-tabel yakni, $F_{hitung} >$ dari F-Tabel (17.80669) dengan P value sebesar 0.00000 dimana $< 0,05$ maka terima H_1 , menerima H_1 dalam uji F simultan berarti bahwa variabel bebas secara serentak mempengaruhi secara signifikan variabel terikat.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokolerasi

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson atau (*Durbin Watson Test*). menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada $2 < DW < 4 - d_{LL}$ maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi atau *no-autocorrelation*.

Menghasilkan nilai Durbin-Watson Stat, yaitu sebesar 2.597883. sedangkan dari tabel dw dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data $n=50$ serta $k=1$. Diperoleh nilai DL sebesar 1.503 dan DU sebesar 1.585. Karena nilai dw 2.597883 berada pada daerah lebih dari ($>$) dl, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat koefisien korelasi bivariat antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik

adalah seharusnya terbebas dari multikolinearitas, dan dapat dilihat dari hasil analisa model tidak ada ditemukan multikolinearitas.

Dimana hasil uji diatas menunjukkan bahwa variabel IPM dan Jumlah Penduduk adalah 0.446027 dimana nilai tersebut kurang dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikoleneartitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut tidak terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari heterokedastisitas.

Dari output dapat diketahui bahwa nilai prob variabel bebas signifikan untuk Dana Desa sebesar 0,1275, Jumlah Penduduk sebesar 0,1853, PDRB sebesar 0.0990 dan IPM sebesar 0,4972sebesar disimpulkan bahwa hasil menunjukkan seluruh nilai Prob variabel bebas lebih besar dari taraf signifikan 0,5 sehingga disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas

4.3.4 Uji Hausman

Untuk menentukan model regresi pada data panel, maka dilakukan uji signifikan antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect* untuk mengetahui model mana yang lebih tepat untuk digunakan. Berikut hasil pengujiannya. menghasilkan nilai p Value dari 0.8779 dimana lebih cenderung ke variabel series yang bermakna metode yang baik digunakan adalah Fixed Effect dibanding Random Effect.

4.4 Interpretasi Hasil

$$IPD_{rt} = -10954 + 0.324 DD_{rt} + 0.009 JP_{rt} + 0.1736 PDRB_{rt} + 0.8917 IPM_{rt}$$

Dari hasil estimasi yang telah diperoleh dapat dibuat sebuah interpretasi model atau hipotesis yang diambil melalui regresi ini, yaitu:

- a. Bahwa variabel (DD) mempunyai pengaruh positif terhadap (IPD) Indeks pembangunan desa sebesar 0.324 dan α 5%. Artinya apabila dana desa bertambah sebesar 1% maka akan meningkatkan IPD sebesar 0.32%
- b. Bahwa variabel (JP) mempunyai pengaruh positif terhadap (IPD) Indeks pembangunan desa sebesar 0.009 dan α 5%. Artinya apabila dana desa bertambah sebesar 1% maka akan meningkatkan IPD sebesar 0.009%
- c. Bahwa variabel (PDRB) mempunyai pengaruh positif terhadap (IPD) Indeks pembangunan desa sebesar 0.1736 dan α 5%. Artinya apabila dana desa bertambah sebesar 1% maka akan meningkatkan IPD sebesar 0.1736%
- d. Bahwa variabel (IPM) mempunyai pengaruh positif terhadap (IPD) Indeks pembangunan desa sebesar 0.8917 dan α 5%. Artinya apabila dana desa bertambah sebesar 1% maka akan meningkatkan IPD sebesar 0.8917 %

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi model regresi variabel IPM, PDRB, Dana Desa, Jumlah Penduduk berpengaruh sebesar 76%, sedangkan sisanya 24,4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model estimasi atau berada dalam *disturbance error term*.
2. Dari hasil *test diagnostic* menyimpulkan variabel Dana Desa (DD) dengan hasil prob 0.0382 dengan taraf signifikan 5% dan variabel Jumlah Penduduk (JP) nilai prob 0.0705 taraf signifikan 10%, kemudian variabel PDRB dengan nilai prob 0.0354 dengan taraf 5% dan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai prob 0.0002 dengan taraf signifikan 1%. Secara parsial maka dapat disimpulkan Bahwa IPM berpengaruh kuat terhadap variabel terikat Indeks Pembangunan Desa (IPD)
3. Secara bersama-sama variabel Dana Desa, JP , PDRB dan IPM berpengaruh positif terhadap IPD (Indeks Pembangunan Desa)
4. Semakin tinggi laju IPM dan tingkat Indeks Pembangunan Desa maka tingkat Sumber daya manusia dan perekonomian juga akan meningkat, maka dari itu hal yang mempengaruhi laju IPM harus di kendalikan pemerintah untuk menjaga stabilitas Sumber Daya Manusia diindonesia.

5.2 Saran

1. Indeks Pembangunan Manusia meskipun tidak satu-satunya variabel ataupun sektor yang mendukung Pembangunan Desa, tetapi apabila IPM berada dalam keadaan tingkat yang tinggi maka akan memberikan dampak yang positif juga pada pembangunan desa, daerah maupun nasional. Pemerintah harus meningkatkan Aksesibilitas di daerah terpencil baik desa ataupun kabupaten agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Indeks Pembangunan Desa tidak hanya di Ukur oleh IPM saja tetapi dapat diukur melalui Anggaran Dana Desa, PDRB Perkapita dan Jumlah Penduduk, variabel tersebut untuk mengukur IPD di Kabupaten. Apabila laju IPD yang tinggi menunjukkan bahwasanya tingkat kualitas sumber daya masyarakat semakin meningkat. Sehingga dengan tingkat kualitas masyarakat yang besar maka secara langsung ataupun tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi. sehingga diperlukannya kebijakan agar kualitas sumber daya manusia di Indonesai meningkat.
3. Dalam Laporan Realisasi Evaluasi Program Dana Desa terhadap Kualitas Hidup dan Ekonomi Masyarakat, menambahkan uraian dari kegiatan atau program desa yang menjadi prioritas dalam peraturan/ kebijakan yang berlaku.
4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith, Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. PT.Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Adisasmita, Raharjo 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Dana Desa , Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah..
- Azwardi, Sukanto. 2014.Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya Juni 2014 Volume 12, No.1 hal: 29 – 41.
- Badan Pusat Statistik. “Gini Ratio Sumatera Utara”
- Badan Pusat Statistik. “ Jumlah Penduduk Kabupaten menurut Jenis Kelamin”
- Badan Pusat Statistik. “Indeks Pembangunan Desa 2018”
- Badan Pusat Statistik. “Indeks Pembangunan Desa 2014”
- Badan Pusat Statistik. “Indeks Pembangunan Manusia menurut Kab/Kota Tahun 2017 s/d 2018”
- Badan Pusat Statistik. “PDRB menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara tahun 2019”
- Badan Pusat Statistik. “Pengeluaran Per kapita Sumatera Utara 2010-2018”
- Badan Pusat Statistik. “Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara 2019”
- Badan Pusat Statistik. “Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara 2020”
- Budiman Rusli, Dkk (2018). “Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan”
- CNBC Indonesia Research,2018/ Tinjauan Tematik Kinerja Ekonomi Jokowi- JKW.
- Djojohadikusumo, Sumitro.1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi : dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan. Edisi Pertama, Jakarta: Pustaka LP3ES

- Gujarati, Damodar, 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi ketiga Jilid 1 Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar, 2003, Ekonometrika Dasar. Terjemahsn: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Iskandar Putong, ND Andjaswati, 2008, “Pengantar Teori Ekonomi Makro” , Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan , UUD No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat.
- Kementrian Keuangan. “Rincian Dana Desa Menurut Kab/Kota Tahun 2020”
- Lembaga Administrasi Negara RI (2017), Mengidentifikasi Tantangan dan Permasalahan Dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Di Indonesia.
- Otonomi Desa, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peta Geografi Kabupaten Sumatera Utara , Sumber; Katadata.com
- Pemerintah Dalam Negeri RI “Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa”
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Prawidya Hairani RS, 2018 “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Indonesia: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Pada Provinsi Se-indonesia.
- Peraturan Menteri Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.11 Tahun 2019, “Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020”.
- Risma. 2017. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016.
- Sriniyati Dkk, (2019). “Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa”.
- Sadono, Sukirno .1985. Ekonomi Pembangunan. Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universtas Indonesia.
- Thomas, 2013. “Tentang Pengelolaan Dana Desa”

Todaro, Michael P.1999. Economics Development in The Third World,
The Longman In New York.

Todaro, Michael P. 1994 Ekonomi Untuk Negara Berkembang . Edisi
ketiga, Jakarta:BUMI AKSARA.

www.SumutProv.go.id “ Peta Kabupaten Provinsi Sumatera Utara